

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Alviana Sahrini Nasution¹, Fauzi Arif Lubis², Rahmat Daim Harahap³

^{1,2,3}Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

email: ¹alvianasahrini@gmail.com, ²fauziariflbs@uinsu.ac.id,

³rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Artikel History:

Artikel masuk
Artikel revisi
Artikel diterima

Keywords:

*Financial Performance,
Economy, Efficiency,
Effectiveness, Value for Money*

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan pada Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial pada Tahun 2019-2021 dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi/pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Pengukuran nilai ekonomi berdasarkan perbandingan anggaran dengan realisasi anggaran. Pengukuran nilai efisiensi berdasarkan perbandingan *output* dan *input*, dimana *output* diperoleh dari capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan nilai efektifitas berdasarkan perbandingan *outcome* dengan *output*, dimana *outcome* adalah target yang ingin dicapai, sedangkan *output* adalah capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan pada Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial pada Tahun 2019-2021 ditinjau dari tingkat ekonomi yaitu sebesar 71,66% masuk dalam kategori cukup ekonomis, 89,40% masuk dalam kategori ekonomis dan 97,77% masuk dalam kategori sangat ekonomis. Ditinjau dari tingkat efisiensi yaitu sebesar 97,68%, 91,72% dan 94,09% masuk dalam kategori sangat efisien. Ditinjau dari tingkat efektivitas yaitu sebesar 70% masuk dalam kategori cukup efektif, 82% masuk dalam kategori efektif dan 92% masuk dalam kategori sangat efektif.

ABSTRACT

This research was conducted to determine the Financial Performance of the South Tapanuli District Social Service in the Institutional Empowerment and Social Welfare Program in 2019-2021 using the Value for Money concept. The research method used in this research is descriptive qualitative method. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used are observation/observation, interviews and documentation. Measurement of economic value is based on a comparison of the budget with budget realization. The measurement of efficiency value is based

on a comparison of output and input, where the output is obtained from the performance achievements of the South Tapanuli Regency Social Service. While the value of effectiveness is based on a comparison of outcomes with outputs, where outcomes are targets to be achieved, while outputs are performance achievements of the South Tapanuli Regency Social Service. The results of this study indicate that the financial performance of the Social Services Office of South Tapanuli Regency in the Institutional Empowerment and Social Welfare Program in 2019-2021 in terms of the economic level, namely 71.66% is in the quite economical category, 89.40% is included in the economic category and 97.77% fall into the very economical category. Judging from the level of efficiency that is equal to 97.68%, 91.72% and 94.09% fall into the very efficient category. Judging from the level of effectiveness, namely 70% is included in the quite effective category, 82% is included in the effective category and 92% is included in the very effective category.

PENDAHULUAN

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang meliputi hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia kini mengalami kemajuan yang semakin pesat. berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur segala aspek pemerintahan. Merencanakan, melaksanakan, memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan pemerintah dilakukan.

Kebutuhan dan hak masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan informasi yang transparan. Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun laporan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah bertanggung jawab atas dana anggaran yang digunakan, memastikan bahwa mereka telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya tidak dapat dipisahkan dengan keberhasilan otonomi daerah. sehingga kinerja pengelolaan keuangan daerah memerlukan perhatian yang lebih besar dari pemerintah daerah. karena pengukuran kinerja merupakan aspek penting dari setiap organisasi, termasuk di sektor publik. Akuntabilitas organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan sejauh

mana program kerja telah dilaksanakan hanya dapat dinilai melalui pengukuran kinerja. Masyarakat harus dimintai pertanggungjawaban atas pelayanan publik yang diberikan dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Bayu, 2020) Mengukur kinerja keuangan memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

1. Mengetahui bagaimana keadaan keuangan dan seberapa baik Anda melakukannya selama beberapa periode.
 2. Memahami kekuatan dan kelemahan kegiatan lembaga.
 3. Digunakan untuk membandingkan hasil yang telah diperoleh.
 4. Mengetahui apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
 5. Ketahui langkah selanjutnya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki masalah.
- (Fanisah Yuliyanda, 2022)

Laporan akuntabilitas kinerja diperlukan untuk melaporkan hasil pengukuran kinerja di sektor publik. Pendanaan publik atas pengelolaan keuangan menghasilkan bentuk akuntabilitas ini. Produksi laporan menunjukkan akuntabilitas publik. Implementasi suatu kegiatan atau kebijakan merupakan subyek pengukuran kinerja; namun, tidak memeriksa alasan untuk ini atau mengidentifikasi penyesuaian yang diperlukan untuk tujuan kegiatan atau kebijakan. (Maharani, 2021)

Kinerja keuangan dapat diukur dengan membandingkan hasil yang dicapai selama periode tertentu dengan yang dicapai pada periode sebelumnya untuk melihat bagaimana tren perkembangan kinerja keuangan diamati. Akuntansi sektor publik biasanya digunakan untuk pengendalian manajemen di pemerintahan, membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Data akuntansi sektor publik dapat digunakan untuk membuat keputusan dan mengalokasikan sumber pendanaan. (Fanisah Yuliyanda, 2022)

Pada sektor publik, value for money merupakan konsep atau citra yang tingkat keberhasilan program kerjanya didasarkan pada tiga faktor yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Tunjangan kinerja terkait dengan konsep nilai uang membantu instansi pemerintah untuk menyadari uang publik sebagai sarana akuntabilitas dan asal-usulnya. (Maharani, 2021)

Salah satu organisasi sektor publik instansi pemerintah adalah Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan. Dinas Sosial adalah organisasi sektor publik yang bertugas memenuhi kebutuhan esensial masyarakat dan melindungi hak-haknya. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan kesejahteraan sosial yang telah dipercayakan kepadanya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. memasukkan kesiapan ke dalam evaluasi kinerja yang dilaksanakan. Kinerja

keuangan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kinerjanya.

Pada tahun 2019-2021, Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung yang akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang berwawasan kemasyarakatan. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial adalah salah satunya, dan memungkinkan program ini disampaikan langsung kepada masyarakat. Berikut laporan realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2019 hingga 2021.

**Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019-2021**

Tahun	Program Kerja	Anggaran	Realisasi	%
2019	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 203.250.000	Rp. 145.640.000	71,66%
2020	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 270.872.000	Rp. 242.181.200	89,40%
2021	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 629.233.200	Rp. 615.198.200	97,77%

Dari tahun 2019 hingga tahun 2021, Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami perkembangan setiap tahunnya. Anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 203.250.000, yang menghasilkan Rp. 145.640.000 dan tingkat penyajian 71,66 persen. Pada tahun 2020 Rp. 270.872.000 dengan nilai realisasi Rp 242.181.200, penyajian 89,40 persen, dan Rp pada tahun 2021. Dengan realisasi Rp 629.233.200 615.198.200 dan tingkat penyajian 97,77 persen. Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan harus memberikan bukti dan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kinerja sektor publik dalam pemerintahan.

**Tabel 2. Indikator Pada Program Dinas Sosial
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019-2021**

Tahun	Program Kerja	Indikator
2019	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan. Meningkatkan koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya

		penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.
2020	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteraan sosial masyarakat.
2021	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Sebuah jembatan untuk memahami bagaimana kinerja organisasi sektor publik adalah gagasan untuk mengukur kinerja mereka menggunakan pendekatan nilai uang. Nilai uang juga mengukur apakah kegiatan organisasi sektor publik telah memberikan manfaat yang diharapkan kepada masyarakat. Demikian pula, anggaran organisasi sektor publik harus dapat diakses oleh publik karena semua sumber pendanaan berasal dari masyarakat. (Hutabarat, 2020).

Masyarakat berhak mengetahui setiap kegiatan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah wajib memberitahukannya kepada masyarakat. Setiap masyarakat memiliki kapasitas untuk secara aktif memantau operasi pemerintah. Nilai untuk uang adalah sebuah konsep dalam manajemen organisasi yang didasarkan pada tiga aspek penting: ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Hasil yang diinginkan terkait dengan pencapaian nilai uang, yang mengacu pada efisiensi dalam penggunaan sumber daya, tujuan yang efektif dan pencapaian tujuan, dan ekonomi dalam akuisisi dan alokasi sumber daya. (Siti May Sarah Tinambunan, 2023).

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pengukuran Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program yang telah direncanakan oleh individu dan organisasi dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam strategi atau perencanaan organisasi. Konsep Pengukuran Kinerja Keluaran/hasil kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan APBD dengan kuantitas dan kualitas yang terukur disebut kinerja keuangan pemerintah daerah. Efektivitas pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan daerah (E. J. Harahap, 2021).

Tingkat likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, stabilitas, atau fleksibilitas perusahaan dapat ditentukan dengan mengukur kinerja keuangannya. Kinerja keuangan diukur dari segi kinerja unit bisnis secara keseluruhan, dan informasi ini diperlukan untuk membuat keputusan penting tentang aset. Kinerja keuangan juga digunakan sebagai titik awal untuk

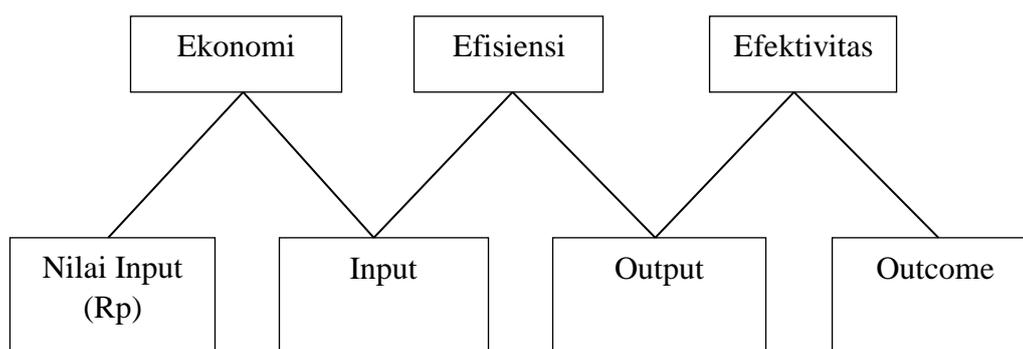
memperkirakan perubahan sumber daya ekonomi masa depan yang dapat dikendalikan. (Pamuji, 2021)

Pendapatan daerah, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif, dan leverage merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. (Nugraheni & Adi, 2020). Faktor individu, faktor kepemimpinan, faktor tim, faktor sistem, dan faktor kontekstual (situasi) merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. (Pamuji, 2021)

Value For Money

Value for Money (VFM) merupakan konsep manajemen sektor publik yang didasarkan pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sebagai tiga komponen utamanya. Value for Money dapat diringkas secara sistemik sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual Value for Money



Efisiensi yaitu efisiensi dalam penggunaan sumber daya, ekonomi yaitu keberhasilan dalam arti tercapainya tujuan dan sasaran yaitu peningkatan efektifitas pelayanan publik, dalam arti terpenuhinya tujuan yang telah ditetapkan, dan efektifitas yaitu keberhasilan dalam pengertian untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meningkatkan standar pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik dengan menghilangkan inefisiensi dan mengurangi konsumsi input, mengalokasikan sumber daya dengan cara yang mengutamakan kepentingan publik, dan berfungsi sebagai dasar untuk akuntabilitas publik dan meningkatkan kesadaran akan dana dan biaya publik. (Maharani, 2021)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) LKjIP adalah format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang memuat laporan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis dan merupakan tindak lanjut atau tanggapan atas Instruksi

Presiden No. 7 Tahun 1999, yang membahas tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Gambaran kinerja instansi pemerintah dalam hal keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuannya disediakan oleh LKjIP. (Fitriasuri, 2021).

LKjIP merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya kinerja, yang merupakan bentuk transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tujuan tercapainya good governance. Selain itu, LKjIP dapat dijadikan umpan balik dalam evaluasi internal untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi. Laporan ini merupakan cerminan kinerja setiap tahun anggaran dan sarana komunikasi kinerja instansi kepada pimpinan, staf, dan pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. (Fitriasuri, 2021).

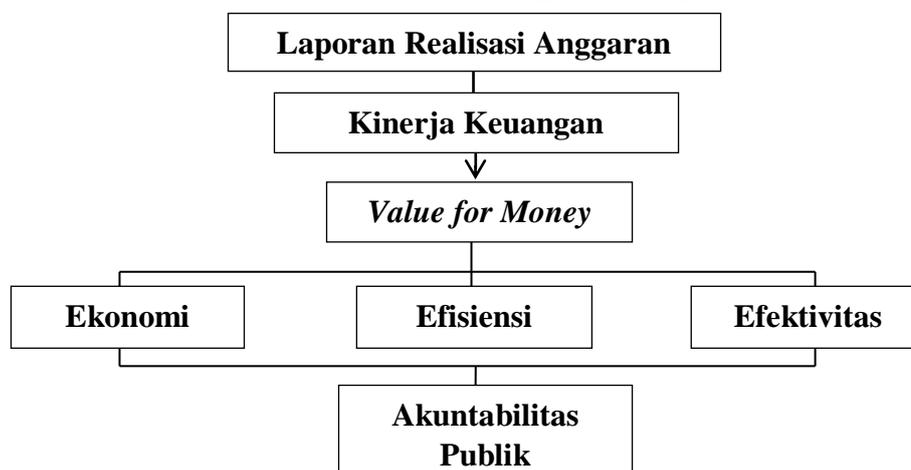
Landasan Hukum Kinerja Keuangan Daerah

Sebagian besar tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas Islam. Informasi ini dapat digunakan oleh sebagian besar pengguna laporan untuk membuat keputusan ekonomi dan menunjukkan pengelolaan dan akuntabilitas (kepengurusan) atas bagaimana sumber daya yang dipercayakan kepada mereka digunakan. Ini merupakan dasar hukum kinerja keuangan daerah. Mereka.

Sejauh mana seseorang atau organisasi berhasil menyelesaikan pekerjaannya, juga disebut sebagai “tingkat kinerja” mereka, inilah yang dimaksud dengan istilah “kinerja” atau “pencapaian kerja”. Orang yang berkinerja baik biasanya disebut produktif, sedangkan mereka yang berkinerja buruk disebut tidak produktif atau berkinerja buruk. (Bayu, 2020).

Kerangka Berpikir

Gambar 2. Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metodologi yang jelas subjektif, dimana eksplorasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran, klarifikasi, serta persetujuan terhadap kekhasan yang sedang diamati. (Ramadhan, 2021) Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Tapanuli Selatan, Jl. Prof. Lapran Pane Kecamatan Sipirok. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berada di Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan. Objek pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan yang kemudian diukur kinerja keuangannya dengan pendekatan *value for money*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dimana data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk angka yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan berupa Laporan Keuangan dari Tahun 2019-2021. Data primer pada penelitian ini berupa wawancara dan observasi. Data sekunder yaitu data-data yang berasal dari perusahaan yang berupa bukti, laporan historis yang tersusun dalam arsip dan hal-hal yang berkenaan dengan materi pembahasan skripsi. Teknik Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di kantor Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Teknik Dokumentasi, yaitu dengan melakukan penghimpunan data secara tidak langsung yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan seperti sejarah singkat organisasi, visi misi organisasi, program kerja yang ada pada Dinas Sosial dan Laporan Kinerja Pemerintah tahun 2019-2021. Peneliti mereduksi data-data yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan serta data-data sekunder lainnya yang dikumpulkan peneliti. Penulis menyajikan data berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran untuk menilai kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan bagian dari Kompleks Tempat Kerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang terletak pada jalur $0^{\circ} 58'35'' - 2^{\circ} 07'33''$ Lingkup Utara dan $98^{\circ} 42'50'' - 99^{\circ} 34'16''$ Bujur Timur . Kajian pelaksanaan moneter melalui pendekatan *incentive for cash*, khususnya dengan menilai penyajian Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan menitikberatkan

pada tiga kualitas, yaitu nilai finansial, nilai kecakapan dan nilai kelayakan pada periode 2019-2020. Cara untuk memperkirakan *value for money* adalah sebagai berikut:

1. Nilai Ekonomi

Nilai moneter digunakan untuk mengkaji tingkat moneter pelaksanaan moneter dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam program penguatan kelembagaan dan bantuan sosial pemerintah tahun 2019-2021. Presentasi asosiasi seharusnya praktis dengan asumsi pengakuan rencana pengeluaran lebih sederhana daripada rencana keuangan dengan pencapaian hasil. Estimasi ini digunakan karena sulit untuk mengubah SDM dan fondasi yang digunakan di unit terkait keuangan dan menentukan biaya informasi apa yang benar-benar diperlukan. (Maryanti, 2021) Maka perhitungan nilai ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Ekonomi} &= \frac{145.640.000}{203.250.000} \times 100\% \\ &= 71,66\% \end{aligned}$$

Perhitungan di atas menunjukkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan dalam program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial tahun 2019 menghasilkan nilai ekonomi sebesar 71,66 persen. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan masuk dalam kategori “cukup ekonomis”. Hal ini menandakan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan akan tetap menggunakan anggaran atau dana yang disisihkan untuk program kegiatan dengan cara yang masih cukup hemat di tahun 2019.

b. Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Ekonomi} &= \frac{242.181.200}{270.872.000} \times 100\% \\ &= 89,40\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, keikutsertaan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan dalam program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial pada tahun 2020 akan menghasilkan nilai ekonomi sebesar 89,40%. Perhitungan di atas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk dalam kategori “ekonomis”. Hal ini menandakan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan akan tetap menggunakan anggaran atau dana

yang disisihkan untuk program kegiatan tersebut secara ekonomis hingga tahun 2020.

c. Tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{Ekonomi} &= \frac{615.198.200}{629.233.000} \times 100\% \\ &= 97,77\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa pameran Bantuan Sosial Rezim Tapanuli Selatan dalam program penguatan kelembagaan dan bantuan sosial pemerintah pada tahun 2021 menghasilkan nilai finansial sebesar 97,77%. Perhitungan di atas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan masuk dalam kategori Sangat Ekonomis. Hal ini menandakan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan akan menggunakan anggaran atau dana yang disisihkan untuk program kegiatan tersebut dengan cara yang dinilai sangat hemat biaya selama tahun 2021.

Tabel nilai ekonomi program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan periode 2019-2021 dapat diturunkan dari uraian sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 3. Pengukuran Nilai Ekonomis Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2021

Tahun	Nilai Ekonomis	Kriteria
2019	71,66%	Cukup Ekonomis
2020	89,40%	Ekonomis
2021	97,77%	Sangat Ekonomis

2. Nilai Efisiensi

Tahun Nilai Ekonomi Kriteria 2019 71,66 persen Sangat Ekonomis 2020 89,40 persen Ekonomis 2021 97,77 persen Sangat Ekonomis Nilai Efisiensi Nilai efisiensi digunakan untuk mengevaluasi efisiensi kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan pada program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial tahun 2019-2021. Efisiensi dan produktivitas adalah konsep yang terkait erat. Hubungan antara masukan dan keluaran organisasi, di mana barang dan jasa yang dibelinya digunakan untuk menghasilkan keluaran tertentu, dikenal sebagai efisiensi. Rasio input

terhadap *output* dapat digunakan untuk menentukan efisiensi. Berikut cara menghitung nilai efisiensi:

a. Tahun 2019

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{70\%}{71,66\%} \times 100\% \\ &= 97,68\% \end{aligned}$$

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan dalam program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial tahun 2019 menghasilkan nilai efisiensi sebesar 97,68 persen. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk dalam kategori Sangat Efisien. Hal ini menandakan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan dapat mengefektifkan penggunaan anggaran (dana) selama tahun 2019 guna mencapai tujuannya dengan melaksanakan program kegiatan ini.

b. Tahun 2020

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{82\%}{89,40\%} \times 100\% \\ &= 91,72\% \end{aligned}$$

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan dalam program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial tahun 2020 menghasilkan nilai efisiensi sebesar 91,72 persen. Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan masuk ke dalam kategori Sangat efisien” yang berarti bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan periode tahun 2020 dapat menggunakan anggaran (dana) secara efisien untuk mencapai tujuan dengan diselenggarakannya program kegiatan tersebut.

c. Tahun 2021

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{92\%}{97,77\%} \times 100\% \\ &= 94,09\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan pada program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial pada tahun 2021 menghasilkan nilai efisiensi sebesar 94,09%. Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan masuk ke dalam kategori sangat efisien” yang berarti bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan periode tahun 2021 dapat menggunakan anggaran (dana) secara efisien untuk mencapai tujuan dengan diselenggarakannya program kegiatan tersebut.

Dari uraian diatas maka dapat ditampilkan dalam bentuk tabel nilai ekonomi program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan periode tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 4. Pengukuran Nilai Efisiensi Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2021.

Tahun	Nilai Efisiensi	Kriteria
2019	97,68%	Sangat Efisien
2020	91,72%	Sangat Efisien
2021	94,09%	Sangat Efisien

3. Nilai Efektivitas

Nilai Efektivitas digunakan untuk menganalisis tingkat efektivitas kinerja keuangan pada kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan pada program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial pada tahun 2019-2021. Efektivitas merupakan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan *outcome* (tujuan yang dikehendaki). Dalam efektivitas tidak disebutkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika suatu organisasi sektor publik mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dikatakan berhasil. Suatu program atau kegiatan dikatakan lebih efektif jika nilai rasio efektivitasnya lebih tinggi. Maka perhitungan nilai efektivitas adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{70\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 70\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan pada program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial pada tahun 2019 menghasilkan nilai efektivitas sebesar 70%. Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan masuk ke dalam kategori “cukup efektif” yang berarti bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan periode tahun 2019 telah berhasil mencapai tujuan yang telah diharapkan.

b. Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{82\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 82\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan pada program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial pada tahun 2020 menghasilkan nilai efektivitas sebesar 82%. Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan masuk ke dalam kategori “efektif” yang berarti bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan periode tahun 2020 telah berhasil mencapai tujuan yang telah diharapkan.

c. Tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{92\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 92\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan pada program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial pada tahun 2021 menghasilkan nilai efektivitas sebesar 92%. Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan masuk ke dalam kategori “sangat efektif” yang berarti bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan periode tahun 2021 telah berhasil mencapai tujuan yang telah diharapkan.

Dari uraian diatas maka dapat ditampilkan dalam bentuk tabel nilai ekonomi program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan periode tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 5. Pengukuran Nilai Efektivitas Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2021

Tahun	Nilai Efisiensi	Kriteria
2019	70%	Cukup Efektif
2020	82%	Efektif

2021

92%

Sangat Efektif

Berdasarkan pembahasan mengenai pengukuran Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas pada kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan dengan program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial pada periode tahun 2019-2021, maka dapat dibuat tabel secara keseluruhan sebagai berikut:

Tabel 6. Pengukuran Tingkat Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2021

Tahun	2019	2020	2021
Nilai Ekonomis	71,66%	89,40%	97,77%
Kriteria	Cukup Ekonomis	Ekonomis	Sangat Ekonomis
Nilai Efisiensi	97,68%	91,72%	94,09%
Kriteria	Sangat Efisien	Sangat Efisien	Sangat Efisien
Nilai Efektivitas	70%	82%	92%
Kriteria	Cukup Efektivitas	Efektivitas	Sangat Efektivitas

Pembahasan

Dengan menggunakan konsep value for money yang terbagi menjadi tiga unsur utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil analisis kinerja keuangan pada kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan di program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial tahun 2019-2021. (Irfansyah, 2021) Berdasarkan hasil analisis data, maka pembahasan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Nilai Ekonomi

Dari analisis yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan melalui program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial pada periode tahun 2019-2021 adalah sebesar 71,66% pada tahun 2019, 89,40% pada tahun 2020, dan 97,77% pada tahun 2021. Dari hasil perhitungan nilai ekonomis tersebut dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan nilai ekonomis setiap tahunnya pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan. Dapat dilihat pada tahun 2019 kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan pada program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial masuk dalam kategori “Cukup Ekonomis”

dengan anggaran sebesar Rp. 203.250.000 dan realisasi anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp. 145.640.000.

Dengan anggaran sebesar Rp, kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan dalam program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial tahun 2020 masuk dalam kategori “Ekonomi”. 270.872.000, dan jumlah yang sebenarnya dikeluarkan adalah Rp. 242.181.200. Dengan anggaran sebesar Rp, kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan dalam program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial tahun 2020 dikategorikan “Sangat Ekonomis”. 629.233.200, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 615.198.200. Menurut (Suminto, 2021) dari sudut pandang ekonomi Islam, konsep ekonomi adalah “bagaimana menghemat anggaran sehemat mungkin dan menghindari pemborosan yang berlebihan”.

Temuan penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Bakti Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Takalar Menggunakan Konsep *Value For Money*” dan dilakukan oleh (Fitriah, 2021) yaitu pada dari segi tingkat ekonomi berada pada kategori sangat ekonomis dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, sedangkan pada penelitian ini berada pada kategori cukup ekonomis, ekonomis, dan sangat ekonomis jika dilihat dari tingkat ekonominya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gagasan ekonomi swadaya untuk menyimpan uang untuk mendapatkan masukan dan tidak membuang-buang uang untuk program kegiatan organisasi telah dilaksanakan dengan baik.

2. Nilai Efisiensi

Hasil analisis menunjukkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan selama periode 2019-2021 sebesar 97,68 persen pada tahun 2019, 91,72 persen pada tahun 2020, dan 94,09 persen pada tahun 2021 melalui program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial. Terlihat dari hasil perhitungan nilai efisiensi terjadi penurunan nilai efisiensi pada tahun 2020, meskipun masih dalam kategori (Sangat Efisien), dan akan kembali stabil pada tahun 2021. , sebesar 94,09 persen. Pada 2019, anggaran yang digunakan sebesar 71,66 persen, dan output tercapai 70 persen. Hal ini menghasilkan nilai efisiensi sebesar 97,68 persen dan dikategorikan “Sangat Efisien”.

Nilai efisiensi sebesar 91,72 persen pada tahun 2020, masuk dalam kategori “Sangat Efisien”, dan outputnya sebesar 82 persen dari anggaran. Selain itu, nilai efisiensi sebesar 94,09% menempatkan operasi pada kategori “Sangat Efisien” pada

tahun 2021 dengan anggaran yang digunakan sebesar 97,77 persen dan output yang dicapai sebesar 92 persen. Menurut (Syahputra A. A., 2021), efisiensi dalam ekonomi Islam bukanlah perbandingan terbaik antara kegiatan pengelolaan sumber daya dengan hasil keluarannya; Sebaliknya, efisiensi dalam pemerintahan mengacu pada sejauh mana pemerintah mampu mengelola sumber daya input dan output serta membandingkan biaya yang dikeluarkan (Syahputra A. A., 2021).

Sedangkan dalam pemerintahan, efisiensi merupakan sejauh mana kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya input dan output dan membandingkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan. (Hamid, 2019) Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Khalifah Fitriah (2021), yang ditinjau dari tingkat efisien masuk dalam kategori efisien dan cukup efisien, sedangkan dalam penelitian ini apabila ditinjau dari tingkat efisiensi masuk dalam kategori sangat efisien. Maka dari hasil yang diperoleh dapat dikatakan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan pada program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial pada periode tahun 2019-2021 dapat dikatakan mampu memenuhi nilai efisiensi.

3. Nilai Efektivitas

Analisis dan perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa nilai efektivitas pada program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial pada tahun 2019 adalah sebesar 70% dan masuk dalam kategori “Cukup Efektif”. Pada tahun 2020 masuk dalam kategori “Efektif” dengan persentase sebesar 82%. Sedangkan pada tahun 2021 masuk dalam kategori “Sangat Efektif” dengan persentase sebesar 92%. Pengukuran efektivitas bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan serta untuk mencapai tujuan ataupun target kebijakan dari suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara melakukan perbandingan antara *outcome* dan *output*. Efektivitas dalam perspektif ekonomi Islam adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai target sesuai dengan yang diharapkan (Nugraheni, 2020).

Dalam pemerintahan efektivitas sendiri bertugas untuk mengukur berhasil atau tidaknya suatu pemerintah mencapai tujuannya (Syahputra A. A., 2021). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Khalifah Fitriah (Fitriah, 2021), yang ditinjau dari tingkat efektivitas masuk dalam kategori efektif dan cukup efektif, sedangkan dalam penelitian ini apabila ditinjau dari tingkat efektivitas masuk dalam kategori cukup efektif, efektif, dan sangat efektif. Dari hasil yang diperoleh, maka

dapat dikatakan bahwa target ataupun tujuan yang telah dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan telah sesuai dengan penilaian persentase yang diperoleh.

SIMPULAN & SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan pada program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial dilihat dari tingkat ekonomi yaitu pada tahun 2019 masuk dalam kategori “Cukup Ekonomis” yaitu sebesar 71,66%. Pada tahun 2020 masuk dalam kategori “Ekonomis” yaitu sebesar 89,40%. Sedangkan pada tahun 2021 masuk dalam kategori “Sangat Ekonomis” yaitu sebesar 97,77%.
2. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan pada program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial dilihat dari tingkat efisiensi pada periode 2019-2021 masuk dalam kategori “Sangat Efisien”. Hal ini dapat dilihat dari analisis pengukuran kinerjanya yaitu sebesar 97,68%, 91,72% dan 94,09%.
3. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan pada program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial dilihat dari tingkat efektifitas yaitu pada tahun 2019 masuk dalam kategori “Cukup Efektif” yaitu sebesar 70%. Pada tahun 2020 masuk dalam kategori “Efektivitas” yaitu sebesar 82%. Sedangkan pada tahun 2021 masuk dalam kategori “Sangat Efektif” yaitu sebesar 92%.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Analisis kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan yang diukur dengan metode *value for money* diharapkan dapat bermanfaat dari temuan penelitian ini, yang juga akan memberikan tambahan informasi dan referensi bagi pembaca.
2. Diharapkan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan terus meningkatkan kinerjanya di bidang pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam hal sarana dan prasarana. Hal ini akan memudahkan masyarakat umum untuk mendapatkan informasi tentang program-program bantuan sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan. Diharapkan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan selalu berusaha mencapai tujuan untuk menuntaskan kinerja keuangan berdasarkan tingkat ekonomi, semakin efisien, dan semakin efektif untuk membahagiakan masyarakat.

3. Diharapkan warga Kabupaten Tapanuli Selatan membantu Dinas Sosial dalam menjalankan program kerjanya dan berperan serta dalam pembangunan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan dapat menambah periode waktu penelitian dan menambah program kerja lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu, M. &. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. 4(1).
- Fanisah Yuliyanda, A. N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep Value For Money pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara. *Profjes* , Volume 01 Edisi 02 .
- Fitriah, N. K. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Menggunakan Konsep Value for Money*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Fitriasuri, R. S. (2021). Penerapan Good Governance Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pemerintahan Daerah. *JIBM* , Vol. 4, No. 1.
- Hamid, A. L. (2019). Evaluation Of Financial Performance Through Approach To Value For Money Evaluasi Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money. *Gorontalo Accounting Journal* , 1(1).
- Hutabarat, F. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Banten: Desanta Muliavisitama.
- Irfansyah, A. (2021). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasi Melalui Pendekatan Value For Money. 4 (1).
- Maharani, R. (2021). Analisis Penilaian Kinerja Berdasarkan Konsep Value For Money Untuk Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Surabaya. *Jurnal Sustainable* , Vol. 01, No. 2.
- Maryanti, C. S. (2021). Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)*. 5(3).
- Nugraheni, E. &. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis. 20 (1).
- Pamuji, Y. R. (2021). Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Rasio Arus Kas Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* , Vol. 16, No. 2.
- Siti May Sarah Tinambunan, M. R. (2023). Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Value For Money di Desa Sitio-Tio Hilir Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)* , Volume 4, Nomor 1.
- Suminto, A. A. (2021). Ekonomi Dalam Pandangan Islam: Serta Perannya Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Pembangunan Islam. *Journal of Sharia and Economic Law* , 1(1), 1–28. <https://doi.org/10.2115>.
- Syahputra, A. A. (2021). Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Ekonomi Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. *Journal Of Accounting* , 3(1), 46–58.

Wijaya, H. &. (2019). Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek. *Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*.